



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 206/KEP/2024

TENTANG

PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KEP/2024 tentang Penetapan Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan kelas jabatan, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Basic* TPP dan Pemberian Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan pada parameter sebagai berikut:
a. kelas jabatan;
b. indeks kapasitas fiskal daerah;
c. indeks kemahalan konstruksi; dan
d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

KETIGA : *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

KEEMPAT : Tata cara perhitungan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

KELIMA : Pemberian TPP berdasarkan kriteria yang terdiri dari:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. tempat bertugas;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

KEENAM : Penyesuaian besaran TPP diberikan kepada:

- a. Pelaksana dengan golongan ruang II/c dan II/d mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan basic TPP kelas jabatan 5;
- b. Pelaksana dengan golongan ruang III/a dan III/b mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan basic TPP kelas jabatan 6;
- c. Pelaksana dengan golongan ruang III/c dan III/d mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan basic TPP kelas jabatan 7;
- d. Pelaksana dengan golongan ruang IV/a dan IV/b mendapatkan penyesuaian minimal berdasarkan basic TPP kelas jabatan 8;
- e. Fungsional Mahir golongan ruang III/c dan III/d mendapatkan penyesuaian berdasarkan basic TPP kelas jabatan 8;
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jenjang pendidikan Strata 1/Diploma IV mendapatkan penyesuaian berdasarkan basic TPP kelas jabatan 6;
- g. Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jenjang pendidikan Diploma III mendapatkan penyesuaian berdasarkan basic TPP kelas jabatan 5;
- h. Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan mendapatkan penyesuaian berdasarkan basic TPP Jabatan Pengawas;
- i. Fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan jabatan mendapatkan penyesuaian berdasarkan basic TPP Jabatan Administrator yang bersesuaian; dan

j. Ketentuan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d tidak berlaku/tidak diberikan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selam 12 (dua belas) bulan.

KETUJUH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KEP/2024 tentang Penetapan Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 JUNI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 206/KEP/2024
 TENTANG
 PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2024

**Hasil Penghitungan Basic TPP Pemerintah Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK (Rp)	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Basic TPP Pemda DIY (Rp)
1	2	3	4	5	6
16	36.870.000	0,7	0,84269	1	21.748.986
15	29.286.000				17.275.314
14	22.295.000				13.151.441
13	20.010.000				11.803.559
12	16.000.000				9.438.128
11	12.370.000				7.296.853
10	10.760.000				6.347.141
9	9.360.000				5.521.305
8	7.523.000				4.437.690
7	6.633.000				3.912.694
6	5.764.000				3.400.086
5	4.807.000				2.835.568
4	2.849.000				1.680.577
3	2.354.000				1.388.585
2	1.947.000				1.148.502
1	1.540.000				908.420

Hasil Penghitungan Besaran TPP Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sesuai Kriteria TPP

a. Kriteria Beban Kerja

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Beban Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	16	85%	18.486.638
2	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	60%	10.365.188
3	Inspektur/Paniradya Pati/Sekretaris DPRD/ Kepala Satuan/ Kepala Dinas/ Kepala Badan	Seluruh OPD	15	60%	10.365.188
4	Kepala Biro/ Staf Ahli Gubernur	Sekretariat Daerah	14	60%	7.890.865
5	Direktur RSJ Grhasia	Dinas Kesehatan	14	60%	7.890.865
6	Wakil Kepala Dinas	Seluruh OPD	14	60%	7.890.865
7	PNS Dokter Utama	Seluruh OPD	14	60%	7.890.865
8	PNS Fungsional Utama kecuali Guru dan Pengawas sekolah	Seluruh OPD	13	60%	7.082.135
9	Wakil Direktur	RSJ Grhasia	13	60%	7.082.135
10	Sekretaris/Kepala Bagian/ Inspektur Pembantu	Seluruh OPD	12	60%	5.662.877
11	Kepala Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah	12	60%	5.662.877
12	Direktur RSP Respira	Dinas Kesehatan	12	60%	5.662.877
13	PNS Fungsional Madya	Seluruh OPD	12	60%	5.662.877
14	Kepala UPT/Kepala Bidang/Kepala Bagian	Seluruh OPD	11	95%	6.932.010
15	PNS Fungsional Madya kecuali Guru dan Pengawas sekolah	Seluruh OPD	11	60%	4.378.112
16	PNS Fungsional Muda	Seluruh OPD	10	60%	3.808.285
17	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Seluruh OPD	9	60%	3.312.783

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Beban Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
18	PNS Fungsional Muda kecuali Guru dan Pengawas sekolah	Seluruh OPD	9	60%	3.312.783
19	Kepala Tata Usaha	Satuan Pendidikan Negeri	8	75%	3.328.267
20	PNS Fungsional Pertama kecuali Guru dan Pengawas sekolah	Seluruh OPD	8	60%	2.662.614
21	PNS Fungsional Penyelia	Seluruh OPD	8	60%	2.662.614
22	PNS Fungsional Penyelia	Satuan Pendidikan Negeri	8	54%	2.396.352
23	PNS Fungsional Mahir	Seluruh OPD	7	60%	2.347.616
24	PNS Fungsional Mahir	Satuan Pendidikan Negeri	7	54%	2.112.855
25	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 7	Seluruh OPD	7	60%	2.347.616
26	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 7	Satuan Pendidikan Negeri	7	54%	2.112.855
27	PNS Fungsional Terampil	Seluruh OPD	6	60%	2.040.051
28	PNS Fungsional Terampil	Satuan Pendidikan Negeri	6	54%	1.836.046
29	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 6	Seluruh OPD	6	60%	2.040.051
30	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 6	Satuan Pendidikan Negeri	6	54%	1.836.046
31	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 5	Seluruh OPD	5	60%	1.701.341
32	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 5	Satuan Pendidikan Negeri	5	54%	1.531.206
33	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 3	Seluruh OPD	3	120%	1.666.301
34	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 1	Seluruh OPD	1	160%	1.453.472
35	PPPK	Seluruh OPD	1	60%	545.052
36	PPPK DIY	Seluruh OPD	1	60%	545.052

b. Kriteria Prestasi Kerja

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	16	30%	6.524.696

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	66%	11.401.707
3	Inspektur/Paniradya Pati/Sekretaris DPRD/ Kepala Satuan/ Kepala Dinas/ Kepala Badan	Seluruh OPD	15	66%	11.401.707
4	Kepala Biro/ Staf Ahli Gubernur	Sekretariat Daerah	14	66%	8.679.951
5	Direktur RSJ Grhasia	Dinas Kesehatan	14	66%	8.679.951
6	Wakil Kepala Dinas	Seluruh OPD	14	66%	8.679.951
7	PNS Dokter Utama	Seluruh OPD	14	66%	8.679.951
8	Wakil Direktur	RSJ Grhasia	13	66%	7,790,349
9	PNS Fungsional Utama kecuali Guru dan Pengawas sekolah	Seluruh OPD	13	66%	7.790.349
10	PNS Guru Utama yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah Utama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	13	20%	2.360.712
11	PNS Guru Utama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	13	10%	1.180.356
12	Sekretaris/Kepala Bagian/Inspektur Pembantu	Seluruh OPD	12	66%	6.229.164
13	Kepala Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah	12	66%	6.229.164
14	Direktur RSP Respira	Dinas Kesehatan	12	66%	6.229.164
15	PNS Fungsional Madya	Seluruh OPD	12	66%	6.229.164
16	PNS Fungsional Madya kecuali Guru dan Pengawas sekolah	Seluruh OPD	11	66%	4.815.923
17	PNS Guru Madya yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah Madya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11	30%	2.189.056
18	PNS Guru Madya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11	15%	1.094.528
19	Kepala UPT/Kepala Bidang/Kepala Bagian	Seluruh OPD	11	66%	4.815.923

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Prestasi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
20	PNS Fungsional Muda	Seluruh OPD	10	66%	4.189.113
21	Kasubbag/Kasubbid/Kasi/Ka TU	Seluruh OPD	9	66%	3.644.061
22	PNS Fungsional Muda kecuali Guru dan Pengawas sekolah	Seluruh OPD	9	66%	3.644.061
23	PNS Guru Muda yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9	38%	2.098.096
24	PNS Guru Muda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9	19%	1.049.048
25	Kepala Tata Usaha	Satuan Pendidikan Negeri	8	66%	2.928.875
26	PNS Fungsional Pertama kecuali Guru dan Pengawas sekolah	Seluruh OPD	8	66%	2.928.875
27	PNS Guru Pertama	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8	23%	1.020.669
28	PNS Fungsional Penyelia	Seluruh OPD	8	66%	2.928.875
29	PNS Fungsional Mahir	Seluruh OPD	7	66%	2.582.378
30	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 7	Seluruh OPD	7	66%	2.582.378
31	PNS Pelaksana Guru	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	27%	1.036.864
32	PNS Fungsional Terampil	Seluruh OPD	6	66%	2.244.057
33	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 6	Seluruh OPD	6	66%	2.244.057
34	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 5	Seluruh OPD	5	66%	1.871.475
35	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 3	Seluruh OPD	3	126%	1.749.617
36	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 1	Seluruh OPD	1	166%	1.507.977
37	PPPK	Seluruh OPD	1	60%	545.052
38	PPPK DIY	Seluruh OPD	1	60%	545.052

c. Kriteria Kondisi Kerja

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	16	13%	2.827.368
2	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	13%	2.245.791
3	Inspektur	Inspektorat	15	17%	2.936.803
4	Paniradya Pati/Sekretaris DPRD/ Kepala Satuan/ Kepala Dinas/ Kepala Badan	Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	15	13%	2.245.791
5	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	15	3%	518.259
6	Staf Ahli Gubernur	Sekretariat Daerah	14	13%	1.709.687
7	Kepala Biro	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.	14	13%	1.709.687
8	PNS Fungsional Utama	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	13	13%	1.534.463
9	PNS Sandiman Utama	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	4.5%	531.160
10	Kepala Badan Penghubung Daerah	Badan Penghubung Daerah	12	61%	5.757.258
11	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai	Dinas Kelautan dan Perikanan	12	13%	1.226.957
12	Sekretaris/Kepala Bagian	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.	12	13%	1.226.957

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
13	Sekretaris/ Inspektur Pembantu	Inspektorat	12	15%	1.415.719
14	PNS Fungsional Madya	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	12	13%	1.226.957
15	PNS Fungsional Madya	Inspektorat	11	15%	1.094.528
16	PNS Fungsional Madya	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	11	13%	948.591
17	PNS Pengelola Barang dan Jasa Madya	Seluruh OPD	11	33%	2.407.961
18	PNS Sandiman Madya	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	7.2%	525.373
19	Kepala UPT/Kepala Bidang	Paniradya Kaistimewan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	11	13%	948.591
20	Kepala Bagian	Sekretariat DPRD	11	13%	948.591
21	Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Infromatika	11	7,5%	547.264
22	PNS Fungsional Muda	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	10	13%	825.128

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
23	Kasubbag	Inspektorat	9	15%	828.196
24	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, UPT Pelabuhan Perikanan, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.	9	13%	717.770
25	Kasubbag/Kasubbid	Badan Penghubung Daerah	9	78%	4.306.618
26	PNS Fungsional Muda	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	9	9,5%	524.524
27	PNS Fungsional Muda	Inspektorat	9	15%	828.196
28	PNS Fungsional Muda	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	9	13%	717.770
29	PNS Sandiman Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	9.5%	524.524
30	PNS Pengelola Barang dan Jasa Muda	Seluruh OPD	9	33%	1.822.031

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
32	PNS Fungsional Pertama	Inspektorat	8	15%	665.653
33	PNS Fungsional Pertama	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	8	13%	576.900
34	PNS Sandiman Pertama	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	12%	532.523
35	PNS Fungsional Penyelia	Inspektorat	8	15%	665.653
36	PNS Fungsional Penyelia	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	8	13%	576.900
37	PNS Sandiman Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	12%	532.523
38	PNS Pengelola Barang dan Jasa Pertama	Seluruh OPD	8	33%	1.464.438

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
39	PNS Fungsional Mahir	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	7	13%	508.650
40	PNS Sandiman Mahir	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	13.5%	528.214
41	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 7	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, UPT Pelabuhan Perikanan, Bagian Pelayanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.	7	13%	508.650
42	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 7	Badan Penghubung Daerah	7	91%	3.560.551
43	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 7	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	7	13,5%	528.214
44	PNS Fungsional Terampil	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah.	6	13%	442.011
45	PNS Sandiman Terampil	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	15.5%	527.013
46	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 6	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, UPT Pelabuhan Perikanan, Bagian Pelayanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.	6	13%	442.011
47	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 6	Badan Penghubung Daerah	6	92%	3.128.079
48	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 6	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	6	15,50%	527.013


No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
49	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 5	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, UPT Pelabuhan Perikanan, Bagian Pelayanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.	5	13%	368.624
50	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 5	Badan Penghubung Daerah	5	110%	3.119.124
51	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 5	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	5	18,5%	524.580
52	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 3	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, UPT Pelabuhan Perikanan, Bagian Pelayanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.	3	13%	180.516
53	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 3	Badan Penghubung Daerah	3	223%	3.096.544
54	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 1	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Umum, Humas, dan Protokol, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, UPT Pelabuhan Perikanan, Bagian Pelayanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.	1	13%	118.095
55	PNS Pelaksana Kelas Jabatan 1	Badan Penghubung Daerah	1	275%	2.498.155

d. Kriteria Tempat Kerja

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Tempat Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

e. Kriteria Kelangkaan Profesi

No	Jabatan	Instansi	Kelas Jabatan	Kelangkaan Profesi (%)	Besaran TPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	16	10%	2.174.899

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X